

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap tuntutan memberlakukan Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan bisnis. Selain itu, banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan seperti KKN, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itulah perlunya penerapan GCG di perusahaan-perusahaan, apabila kondisi GCG dapat dicapai maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih (*clean government*) dan terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) serta tatakelola perusahaan yang baik (Effendi A, 2016:144).

Konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan Internasional Monetary Fund (IMF) pasca krisis. GCG merupakan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan GCG adalah meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kemakmuran, serta diarahkan berdampak positif pada kinerja keuangan dan kontrol perusahaan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan GCG dibutuhkan mekanisme tersistem untuk memantau kebijakan yang diterapkan. Pada mulanya, pelaksanaan GCG di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada sanksi yang diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun, di tahun 2012 GCG wajib diterapkan pada perusahaan BUMN. Untuk perusahaan lain, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) hanya menyediakan kuesioner penilaian sendiri untuk melihat kualitas tata kelola perusahaannya. GCG dapat tercapai apabila perusahaan memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kesetaraan.

Pratama (2013) menyebutkan bahwa dalam asas transparansi, perusahaan diwajibkan untuk memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas harus mempunyai laporan atas kegiatan perusahaan baik yang berhubungan dengan pihak internal perusahaan juga dengan masyarakat. Asas responsibilitas juga mewajibkan perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tidak hanya peraturan perusahaan, tetapi juga peraturan perundang-undangan negara dimana perusahaan tersebut berada. Asas-asas tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya kinerja perusahaan tersebut.

Peningkatan kinerja perusahaan mutlak diperlukan sebagai salah satu dasar untuk menilai kualitas perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) prinsip dasar untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam penerapan GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah:

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan dituntut secara hukum untuk menerapkan prinsip GCG seperti yang tersirat dalam Pedoman Umum *Good*

Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) (2010) diantaranya: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan. Dijelaskan pada Pedoman Umum GCG Indonesia dalam Solihin (dikutip oleh Ramdhaningsih dan Utama, 2013) khususnya prinsip responsibilitas, dimana pedoman tersebut dinyatakan bahwa perusahaan wajib mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga tercipta suatu *corporate citizenship*.

Sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, *good corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan dan iklim persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan GCG dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi perusahaan yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2004).

Menurut Boedex (2010) dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan berperan sebagai agent atau pengelola perusahaan yang kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang diketahui oleh presiden direktur. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016:26- 27).

Menurut Firmsstat (2009) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Menurut Bapepam melalui SE03/PM/2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-315/BEJ/06/2000 komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, salah satu diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan mekanisme GCG yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya manipulasi dalam informasi yang disajikan (Effendi, 2016:59). Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. (Ikatan Komite Audit Indonesia, dalam Effendi 2016:48).

Tidak dipungkiri bahwa tujuan didirikan perusahaan adalah menghasilkan laba (*profit*). Perusahaan harus mampu menghasilkan laba pada periode tertentu agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang. Profitabilitas

perusahaan merupakan dasar penilaian kondisi perusahaan sehingga dibutuhkan alat analisis dengan menggunakan rasio profitabilitas. *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan investor untuk melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan asset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Penelitian mengenai mekanisme GCG terhadap profitabilitas perusahaan telah banyak dilakukan namun diperoleh hasil yang belum konsisten. Penelitian Hisamuddin dan Tirta (2012) menunjukkan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh terhadap ROA. Kemudian, penelitian Diandono (2012) serta Tertius dan Christiawan (2013) menunjukkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ROA. Penelitian Syafiqurrahman et. al. (2014) menunjukkan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROA.

Perusahaan yang menjadi populasi adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 karena merupakan perusahaan yang menjadi contoh penerapan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penerapan GCG. Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia sangat besar, salah satunya melakukan privatisasi. Artinya, pihak selain pemerintah, misalnya institusi, publik, manajemen, ataupun asing dapat menanamkan modalnya di perusahaan BUMN.

Penelitian ini menggunakan proksi GCG yaitu Kepemilikan Institusional , dewan komisaris independen , dewan direksi dan komite audit. Profitabilitas perusahaan diproksi menggunakan *Return On Asset* (ROA). Masih banyaknya perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah GCG berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Padahal seperti yang diketahui bahwa GCG merupakan salah satu strategi jangka panjang agar perusahaan tetap survive. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme GCG terhadap profitabilitas perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Profitabilitas Perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji pengaruh kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas Perusahaan.
2. Menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perusahaan.
3. Menguji pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perusahaan.
4. Menguji pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang topik GCG dan profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan BUMN

Penelitian ini diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai wacana untuk lebih mengoptimalkan penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan.

b. Bagi Manajer Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu lebih transparan dalam melaporkan seluruh laporan keuangan perusahaan. Manajemen adalah pihak yang dipercaya oleh para pemegang saham dalam mengelola perusahaan.

c. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan menggunakan aspek GCG sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi.

d. Bagi Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan lebih mendorong pihak manajemen dalam memperhatikan penerapan mekanisme GCG. Atas dasar GCG memungkinkan pihak-pihak dalam perusahaan dapat bertindak sesuai fungsinya sehingga para pemegang saham dapat memperoleh return yang sesuai dengan investasinya.